

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Puncak Bogor merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling diminati di Jawa Barat, terutama oleh wisatawan dari Jabodetabek. Pesona alamnya yang asri, ditambah dengan suasana pegunungan yang sejuk, menjadikan kawasan ini sebagai tujuan utama bagi para pelancong, khususnya pada akhir pekan dan liburan panjang (Ramadhan, 2021). Namun, popularitas Puncak Bogor juga membawa dampak negatif terhadap pengelolaan ruang publik dan tata kelola lingkungan, salah satunya adalah maraknya keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang kaki lima (PKL) saat ini menjadi salah satu aset penting di Indonesia dan menjadi perhatian utama pemerintah dalam melakukan penyesuaian struktural sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Munculnya PKL di berbagai kota, khususnya di kota-kota besar, merupakan solusi praktis bagi masyarakat untuk mencari penghasilan, namun dengan semakin banyaknya PKL, tata kota menjadi kurang teratur, karena perhatian mereka lebih terfokus pada upaya menghasilkan pendapatan secara cepat daripada mempertimbangkan efisiensi dan estetika kota, selain itu, sering kali masalah terkait ketersediaan lokasi bagi PKL kurang diperhatikan, sehingga mereka kesulitan mendapatkan tempat yang layak untuk berdagang (Pratama & Hamzah, 2021).

Menurut analisis yang dilakukan oleh Sudrajat (2020), keberadaan pedagang kaki lima memiliki dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat pengangguran, serta peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk-produk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan toko atau rumah makan pada umumnya. Meskipun keberadaan pedagang kaki lima membawa manfaat, mereka juga menimbulkan sejumlah permasalahan baru, berjualan di tepi jalan sering dianggap sebagai gangguan yang dapat mengurangi daya tarik estetika suatu kawasan.

Menurut Sari & Wahyudi (2024) Keberadaan pedagang kaki lima seringkali tidak mendukung estetika kota, karena mereka lebih fokus pada cara memperoleh

pendapatan dengan cepat, selain itu, kehadiran mereka juga menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan dan masalah sampah, karena tidak tersedia fasilitas pembuangan sampah yang memadai, akibatnya, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan warga setempat pun terganggu. Begitupun keberadaan PKL di kawasan wisata Puncak Bogor memegang peranan penting dalam penyediaan layanan langsung kepada wisatawan, seperti makanan, minuman, hingga barang-barang cendera mata, meskipun keberadaan PKL memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, keberadaan mereka juga sering kali memunculkan tantangan dalam tata kelola ruang dan lingkungan. PKL yang tidak tertata dengan baik kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas, menumpuknya sampah, dan mengganggu kenyamanan wisatawan. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap citra kawasan wisata dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

Kebijakan pemerintah terkait penataan PKL didasarkan pada sejumlah regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menata PKL secara lebih tertib, dalam peraturan ini, penataan PKL harus mempertimbangkan zonasi usaha, kenyamanan publik, penataan ruang, serta keberlanjutan ekonomi para pedagang kecil (Kementrian Dalam Negeri, 2012).

Dalam konteks tata kelola kawasan, maraknya PKL yang beroperasi secara tidak teratur di sepanjang jalan utama Puncak juga memperburuk kualitas tata ruang karena ketidakmampuan pengelola untuk mengatur zonasi aktivitas wisata yang harmonis antara pelaku usaha kecil dan kebutuhan wisatawan akan kenyamanan serta estetika ruang, tujuan penataan kawasan wilayah Kabupaten Bogor adalah menciptakan tata kelola yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, dengan fokus pada sektor pariwisata, permukiman, industri, dan pertanian, langkah ini diharapkan dapat mendorong perkembangan wilayah yang merata dan meningkatkan daya saing, guna mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera (Utami, 2023).

Dalam mengatasi permasalahan ini, pemindahan PKL ke lokasi yang lebih tertata seperti *Rest Area* Gunung Mas menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan, Pemkab Bogor saat ini tengah mengajukan perluasan lahan *rest area* yang saat ini memiliki luas 7 hektar kepada PTPN VIII (PT Perkebunan Nusantara) selaku pemilik lahan Gunung Mas Puncak yang merupakan salah satu perkebunan teh terbesar di Jawa Barat (Fitriani, et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya inisiatif untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di kawasan wisata, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional PKL serta meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata di daerah tersebut.

Mengutip dari Kompas.com (2024) relokasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola kawasan wisata dengan cara mengurangi beban lalu lintas di titik-titik kemacetan, mengatur distribusi ruang usaha yang lebih tertata, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan kenyamanan wisatawan, *Rest Area* Gunung Mas sebagai tempat yang sudah direncanakan untuk menampung PKL menyediakan lokasi yang lebih terorganisir, sehingga memungkinkan para PKL untuk tetap menjalankan usahanya tanpa mengganggu arus wisatawan.

Namun, relokasi PKL ini juga menghadapi tantangan yang signifikan, terutama penolakan dari sebagian pedagang, banyak PKL merasa bahwa lokasi baru akan mengurangi jumlah pengunjung dan berpotensi menurunkan pendapatan mereka. Selain itu, ada kekhawatiran meskipun lebih tertata, *Rest Area* Gunung Mas tidak akan mampu menarik minat wisatawan sebanyak lokasi PKL yang sebelumnya berada di sepanjang jalur utama yang ramai dilalui pengunjung. Penolakan ini seringkali didasarkan pada faktor ekonomi dan kekhawatiran akan hilangnya sumber pendapatan utama bagi pedagang.

Melalui langkah ini diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pengelolaan kawasan wisata yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan relokasi ini masih menjadi pertanyaan, sejauh mana relokasi PKL ke *Rest Area* Gunung Mas dapat memberikan dampak positif terhadap kenyamanan pengunjung, arus lalu lintas, dan kelestarian lingkungan yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana kebijakan

ini berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi para pedagang serta respon wisatawan, oleh karena itu, penulis mengambil judul **“ANALISIS RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KE *REST AREA* GUNUNG MAS DALAM PENATAAN KAWASAN WISATA PUNCAK BOGOR”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa tantangan utama yang dihadapi PKL dalam proses relokasi?
2. Bagaimana relokasi PKL ke *Rest Area* Gunung Mas berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan?
3. Bagaimana dampak relokasi terhadap kenyamanan wisatawan di Puncak Bogor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi relokasi PKL ke *Rest Area* Gunung Mas dalam mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjaga estetika kawasan wisata Puncak Bogor.
2. Untuk mengetahui apakah tantangan yang dihadapi pedagang dalam proses pemindahan PKL di kawasan wisata Puncak Bogor dan bagaimana cara mereka menghadapinya.
3. Untuk mengetahui dampak pemindahan PKL terhadap kenyamanan wisatawan dan kualitas tata kelola ruang di kawasan Puncak Bogor.

Adapun manfaat penelitian yang dapat terbagi kedalam 3 hal sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pengetahuan, khususnya dalam bidang pariwisata, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi kawasan wisata.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi baru di Program Studi Pariwisata Universitas Nasional, serta sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu serupa, baik di kawasan wisata Puncak Bogor maupun di daerah lain yang menghadapi tantangan yang sama dalam pengelolaan PKL.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan analisis mendalam tentang permasalahan yang dihadapi di suatu kawasan wisata dan pemahaman terkait penataan kawasan wisata.

b. Bagi Narasumber

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan dampak positif terhadap para narasumber yang bersedia berkontribusi memberikan informasi kepada penulis terkait penataan PKL di kawasan wisata Puncak Bogor.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengeksplorasi tema serupa, baik di kawasan Puncak Bogor maupun di daerah lain.

d. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang lebih efektif dan berkelanjutan.

e. Bagi Pengelola

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan bahan evaluasi untuk pengelola dalam menata dan memberikan saran bimbingan kepada pedagang di *rest area*.

3. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata dan interaksi antara pedagang kaki lima (PKL) dan pengelola destinasi wisata.
- b. Penelitian ini dapat menambah perspektif teoritis tentang pentingnya pengaturan ruang untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan wisata Puncak Bogor.
- c. Penelitian ini dapat memberikan analisis mendalam tentang dampak kebijakan publik terhadap kehidupan masyarakat lokal dan keberlangsungan pariwisata. Dengan menilai respons pedagang terhadap kebijakan relokasi, penelitian ini dapat berkontribusi pada diskusi teoritis tentang efektivitas kebijakan dalam pengelolaan pariwisata.

